

ISSN: 2621-6582 (p)
2621-6590 (e)

Living Islam

JOURNAL OF ISLAMIC DISCOURSE

VOLUME 3 NOMOR 2 JANUARI 2021



**PANAS PELA PENDIDIKAN DI SEKOLAH:
DESEGREGASI ISLAM DAN KRISTEN MELALUI
KEARIFAN LOKAL**

Anju Nofarof Hasudungan

**MENCARI KALIMATUN SAWA DALAM
PLURALISME AGAMA (Kajian dalam Perspektif
Islam)**

Nuraeni

**TRADISI SAKRAL DAN TRADISI POPULIS
DALAM MASYARAKAT MUSLIM DI
INDRAMAYU**

Frenky Mubarak

**TRADISI MOING KE KUBURAN PADA 1
SYAWAL HARI RAYA IDUL FITRI DI DESA
SIMPANG EMPAT, KECAMATAN TANGARAN,
KABUPATEN SAMBAS**

Hadi Wiryawan

**RESEPSI AL-QUR'AN DI MEDIA SOSIAL: Studi
Kasus Film Animasi Nussa Episode "Hiii Serem!!!"**

Qurrata A'yun

**RESEPSI MASYARAKAT TIMUR INDONESIA
TENTANG "SOPP" (Reinterpretasi Terhadap
Empat Serangkai Ayat Khamar)**

Muhammad Sakti Garwan

**TASAWUF DI ERA MODERNITAS (Kajian
Komperhensif seputar Neo-Sufisme)**

Muhammad Sakdullah

**KONSTRUKSI TAHLIL KELILING SELAMA
BULAN RUWAH**

Muhammad Anwar Idris & Qona'ah Dwi Hastuti

**PEMIKIRAN K.H. A.WAHID HASYIM TENTANG
RELASI ISLAM DAN NEGARA**

Ahmad Asroni

**RELASI KUASA POLITIK TOKOH AGAMA
DALAM HEGEMONI PEMILUKADA 2020**

Mahatva Yoga Adi Pradana

**PRESIDEN PEREMPUAN: Studi atas Pandangan
Kiyai Husein Muhaammad**

Gazali & Syafrizal

**PRODI MAGISTER AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM, FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**



ISSN 2621-6582 (p); 2621-6590 (e)

Volume 3 Nomor 2, Januari 2021

Living Islam: The Journal of Islamic Discourses is an academic journal designed to publish academic work in the study of Islamic Philosophy, the Koran and Hadith, Religious Studies and Conflict Resolution, both in the realm of theoretical debate and research in various perspectives and approaches of Islamic Studies, especially on Islamic Living of particular themes and interdisciplinary studies.

Living Islam: Journal of Islamic Discourses published twice a year (June and November) by the Department of Islamic Aqeedah and Philosophy, the Faculty of Ushuluddin and Islamic Thought, Islamic State University of Sunan Kalijaga Yogyakarta.

PEER REVIEWER

Ajat Sudarajat - Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia
Al Makin - UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
Mohammad Amin Abdullah - UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
Mouhanad Khordichide - Universitat Munster Germany
Umma Farida - IAIN Kudus, Indonesia
Mun'im Sirry - Notre Dame University, USA
Sahiron - UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
Mohammad Anton Ato'illah - UIN Sunan Gunung Djari Bandung, Indonesia
Muhammad Alfatih Suryadilaga - UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Inayah Rohmaniyah - UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

EDITOR IN-CHIEF

H. Zuhri - UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

MANAGING EDITOR

Rizal Al Hamid - UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

EDITOR

Achmad Fawaid - Universitas Nurul Jadid Paiton, Probolinggo
Ahmad Rafiq - UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Ahmad Zainul Hamdi - UIN Sunan Ampel Surabaya
Aksin Wijaya - IAIN Ponorogo
Chafid Wahyudi - STAI Al-Fitrah Surabaya
Fadhli Lukman - UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fahrudin Faiz - UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Islah Gusmian - IAIN Surakarta
Miski - UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Saifuddin Zuhri Qudsy - UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

OPEN ACCESS JOURNAL INFORMATION

Living Islam: Journal of Islamic Discourses committed to principle of knowledge for all. The journal provides full access contents at
<http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/li/index>

DAFTAR ISI

<i>PANAS PELA</i> PENDIDIKAN DI SEKOLAH: DESEGREGASI ISLAM DAN KRISTEN MELALUI KEARIFAN LOKAL Anju Nofarof Hasudungan	257-277
MENCARI <i>KALIMATUN SAWA</i> DALAM PLURALISME AGAMA (Kajian dalam Perspektif Islam) Nuraeni	278-290
TRADISI SAKRAL DAN TRADISI POPULIS DALAM MASYARAKAT MUSLIM DI INDRAMAYU Frenky Mubarok.....	291-303
TRADISI MOING KE KUBURAN PADA 1 SYAWAL HARI RAYA IDUL FITRI DI DESA SIMPANG EMPAT, KECAMATAN TANGARAN, KABUPATEN SAMBAS Hadi Wiryawan	304-318
RESEPSI AL-QUR'AN DI MEDIA SOSIAL: Studi Kasus Film Animasi Nussa Episode "Hiii Serem!!!" Qurrata A'yun	319-337
RESEPSI MASYARAKAT TIMUR INDONESIA TENTANG " <i>SOPI</i> " (Reinterpretasi Terhadap Empat Serangkai Ayat Khamar) Muhammad Sakti Garwan.....	338-363
TASAWUF DI ERA MODERNITAS (Kajian Komperhensif seputar Neo-Sufisme) Muhammad Sakdullah	364-386
KONSTRUKSI TAHLIL KELILING SELAMA BULAN RUWAH Muhammad Anwar Idris & Qona'ah Dwi Hastuti.....	387-401
PEMIKIRAN K.H. A.WAHID HASYIM TENTANG RELASI ISLAM DAN NEGARA Ahmad Asroni	402-416
RELASI KUASA POLITIK TOKOH AGAMA DALAM HEGEMONI PEMILUKADA 2020 Mahatva Yoga Adi Pradana.....	417-438
PRESIDEN PEREMPUAN: Studi atas Pandangan Kiyai Husein Muhaammad Gazali & Syafrizal	439-450

RELASI KUASA POLITIK TOKOH AGAMA DALAM HEGEMONI PEMILUKADA 2020

Mahatva Yoga Adi Pradana

Sosiologi Agama UIN Sunan Kalijaga
mahatva.pradana@uin-suka.ac.id

Abstact

This article describes the political power relationship conducted by religious leaders in Malang Regency in the framework of the election of regional heads. In the social life of society, religious figures have a high status until finally referred to as the local elite. Social status is a power born of the legitimacy of society. In addition, the political power in the possessed comes from a network built against the background of the organization. Although this paper starts with the survey results, the authors use a qualitative approach to the case study model. Where the data source comes from interviews of people, people and actors who live and know religious figures who enter politics. In the context of the locality of Malang Regency, religious leaders become alternative references to problem solving. The power of religious figures became the initial capital chosen by the people. It is therefore perfectly natural for religious figures to have an important position in local political contestation. With the dimensions of power described by Gaventa in powercube theory as well as other political philosophical figures. Showing the power of religious figures is within the territory mentioned Gaventa, seen in the structure of power, not seen outside as an adviser and hidden by conducting underground movements. Therefore, the position of religious figures in politics has also become increasingly popular with political elites in support.

Keywords: Religious People; Power Relations, Local Elections

Abstrak

Artikel ini menggambarkan relasi kuasa politik yang dilakukan tokoh agama di Kabupaten Malang dalam rangka pemilihan kepala daerah. Dalam wilayah sosial kemasyarakatan, tokoh agama memiliki status yang tinggi sampai akhirnya disebut

sebagai elit lokal. Status sosial itu berupa kekuasaan yang lahir dari legitimasi masyarakat. Selain itu kekuasaan politik yang di miliki berasal dari jaringan yang dibangun dengan latar belakang organisasi. Meskipun tulisan ini berawal dari hasil survey, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan model studi kasus. Dimana yang menjadi sumber data berasal hasil wawancara tokoh, masyarakat serta pelaku yang tinggal dan mengenal tokoh agama yang masuk dalam politik. Dalam konteks lokalitas masyarakat Kabupaten Malang, tokoh agama menjadi rujukan alternatif pemecahan masalah. Kekuasaan tokoh agama menjadi modal awal dipilih oleh masyarakat. Oleh karena itu sangatlah wajar apabila tokoh agama memiliki posisi yang penting dalam kontestasi politik lokal. Dengan dimensi kekuasaan yang dijelaskan oleh Gaventa dalam teori Powercube serta tokoh filsafat politik lain. Menunjukkan kekuasaan tokoh agama berada dalam wilayah yang disebutkan Gaventa, terlihat didalam struktur kekuasaan, tidak terlihat diluar sebagai penasihat dan tersembunyi dengan melakukan gerakan bawah tanah. Oleh karena itu posisi tokoh agama dalam berpolitik juga menjadi kian digemari oleh para elit politik dalam dukung mendukung.

Kata Kunci : Tokoh Agama; Relasi Kuasa, Pemilu

PENDAHULUAN

Dinamika perubahan sosial politik banyak terjadi di masyarakat. Perubahan tersebut menciptakan berbagai macam diskursus bahkan problematika sosial. Pandangan yang demikian ini nyatanya juga membentuk relasi kekuasaan baru.¹ Dimana relasi ini melibatkan dua hal yang menjadi perdebatan publik. Tentang agama yang dipaksakan idealismenya masuk dalam dunia politik.² Bentuk idealisme agama yang ada seperti halnya yang dilakukan oleh sekelompok pihak yang menyatakan bahwa negara Indonesia harus menggunakan sistem khilafah.³ Masalah tersebut tentu tidak sekali dua kali muncul, melainkan wacana yang terus bergulir dikarenakan Indonesia adalah negara mayoritas muslim. Problematika ini tidak hanya berada di pusat, melainkan dalam tataran lokal dimana tokoh agama memiliki fungsi kekuasaan yang berbeda.⁴

Kekuasaan tokoh agama memang memiliki pengaruh tersendiri bagi masyarakat. Dimana kekuasaannya terdapat pada struktur sosial dan budaya sekitar. Terutama tokoh agama muslim di wilayah pedesaan.⁵ Banyak masyarakat yang menyebut tokoh agama muslim itu sebagai kyai kampung. Tokoh agama selain memiliki pengaruh sosial juga memiliki pengaruh dalam politik. Sebagai pemilik kekuasaan keagamaan, relasi tokoh agama dan masyarakat tidak hidup dalam struktur sosialnya saja, namun juga dalam ranah politik. Terlebih dalam

¹ Saputro, A. (2018). AGAMA DAN NEGARA: POLITIK IDENTITAS MENUJU PILPRES 2019. *ASKETIK*, 2(2). <https://doi.org/10.30762/ask.v2i2.912>

² Zawawi, A., Pd, S., & Pd, M. (2015). *POLITIK DALAM PANDANGAN ISLAM*. *Jurnal Ummul Qura Vol V, No 1, Maret 2015* hal.85-100

³ <https://nasional.kompas.com/read/2018/05/07/15542341/hakim-hti-terbukti-ingin-mendirikan-negara-khilafah-di-nkri?page=all> (diakses 22 maret 2020)

⁴ Aswar, H. (n.d.). *Pengaruh Ulama Dalam Politik Di Negara Muslim*: JURNAL ILMU SOSIAL INDONESIA, VOL.2,NO.1,Maret 2015 hal 85-102.

⁵ Jannah, H. (2015). *KYAI, PERUBAHAN SOSIAL DAN DINAMIKA POLITIK KEKUASAAN*. **FIKRAH: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan Volume 3, No.1, Juni 2015**

Yoga Adi Pradana

memetakan kekuatan politis masyarakat sekitar. Karena inilah tokoh agama disejajarkan dengan elite lokal yang berada ditengah struktur sosial dan kultural masyarakat. Sehingga figur ini begitu disanjung dan dihormati seperti kyai yang memiliki pondok pesantren. Oleh karena itu sangat masuk akal apabila banyak masyarakat yang mengikuti langkah-langkahnya.⁶

Tokoh agama dengan status sosial tinggi, kemudian menjadi elit lokal yang memiliki relasi serta kekuasaan dan akhirnya masuk ke dalam struktur organisasi politik. Tahapan inilah yang menjadikan tokoh agama sebagai komoditas partai politik. Dimana partai politik mencari calon kepala daerah yang diusung melalui figur-figur daerah yang memiliki kekuatan serta kekuasaan. Seperti yang sudah dilakukan dalam penelitian yang ada, kyai memiliki peran berkitan dalam tindakan politik. Pertama, merupakan *patronase* bagi masyarakat dimana kyai memiliki fungsi untuk menentukan pilihan politik masyarakat sekitar dimana dirinya tinggal. Kedua, sebagai elit politik dimana ulama tersebut masuk dan bergabung di dalam struktur organisasi partai. Ketiga, kyai sebagai mediator politik dimana memiliki fungsi sebagai penengah apabila terjadi konflik.⁷

Perilaku ulama dalam politik tidak bisa dikesampingkan manfaatnya, sebagai bentuk simbol elit lokal.⁸ Seperti yang terjadi di Bantaeng tentang kemenangan Nurdin Abdullah ini menjadi proses berputarnya elit politik dengan basis non trah atau kalangan massa. Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan politik dengan penguatak karakter dan kualitas personal yang kuat dapat menciptakan pola kekuasaan.⁹ Peran serta membangun jaringan sangat dibutuhkan. Meminjam penjelasan Gaventa tentang teori yang digunakan. Perilaku yang dilakukan ulama sebagai elit lokal yang memiliki kontrol, peran serta relasi kekuasaan. Kerangka pemikiran ini sesuai dengan Teori Powercube atau kubus kekuasaan dimana ulama menggunakan kekuasaannya sebagai control seseorang dan kelompok terhadap individu serta kelompok lain. Disampaikan juga oleh Gaventa, bahwa bentuk relasi kekuasaan dalam kerangka pemikiran itu terletak pada tiga bentuk kekuasaan, yaitu wilayah level, ruang dan bentuk.¹⁰

Dalam wilayah level, posisi Ulama yang memiliki kekuasaan yang tinggi di masyarakat. Dimana kekuasaan informalnya dapat menjangkau masyarakat untuk patuh pada petuah yang disampaikan. Pada wilayah ruang, para ulama memanfaatkan wilayah mereka pada tataran pondok pesantren serta organisasi keagamaan yang di ikuti untuk menegaskan kekuatannya.

⁶ Chalik, A. (2015). *ELITE LOKAL BERBASIS PESANTREN DALAM KONTESTASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI JAWA TIMUR*. KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman Vol. 23 No. 2, Desember 2015: 363-381 DOI: 10.19105/karsa.v23i2.744

⁷ Nurhadi, Sunarso, PERAN KIAI DALAM MEMBANGUN PARTISIPASI PEMILIH, *JIPPK, Volume 3, Nomor 2, Halaman 169-175* ISSN: 2528-0767 (p) dan 2527-8495 (e) <http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk>

⁸ Halim, Abdul, *Politik Lokal; Pola, Aktor dan Dramatikalnya* (Yogyakarta: LP2B, 2014) hal 51

⁹ Haboddin, M. (2020). Sirkulasi Elite Lokal di Bantaeng. *Jurnal Transformative*, 6(1), 72–90. <https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2020.006.01.4>

¹⁰ Gaventa, John, "Finding The Spaces for Changes; A Power Analysis", *IDS (Institute of Development Studies) Bulletin*, Vol. 37, No. 6 (November 2006)

Semakin besar pondok pesantren serta ormas keagamaan yang dipimpin, maka jamaahnya juga semakin besar tentu dapat meningkatkan animo untuk dipilih. Dalam ranah bentuk, kekuasaan ulama atau elit agama ini membawahi bidang agama serta sosial, secara bentuk kekuasaan sudah mendapatkan sejak diri mereka mendapatkan pengakuan. Oleh karena itu tidak jarang banyak masyarakat yang berujar, “ *nderek pak jai* “. Perilaku tersebut sebagai bukti bentuk kekuasaan yang ada.

Secara umum terdapat dua buah konsep tentang kuasa yakni : *power to*” dan “*power over*.”¹¹ Namun kedua konsep ini nampaknya tidak dapat di masukkan dalam tindakan yang dilakukan oleh tokoh agama. Meskipun tokoh agama memiliki relasi kuasa untuk melakukan tindakan yang dikehendaki, relasi kuasa ini belum dapat di letakkan pada kuasa atas sepenuhnya masyarakat yang memilih dirinya dalam pemilukada. Konsepsi “*power to*” memang dapat di gunakan sebagai aspek yang penting dalam tindakan tokoh agama. Sejatinya ini terjadi karena tokoh agama melihat kuasa yang di dapatkan, punya otoritas untuk mengatur masyarakat.¹²

Keberhasilan tokoh agama memimpin masyarakat sekitar menunjukkan semakin berpengaruhnya nilai agama dalam otoritas membangun lingkungan sosialnya.¹³ Dimana tanpa harus dikordinasi, masyarakat tergerak langung serta merasakan dampak emosionalnya. Dalam stratifikasi sosial, posisi tokoh agama atau ulama memiliki keistimewaan posisi di masyarakat. Bisa sebagai tokoh yang dituakan dan orang yang mengerti segala hal. Oleh karena itu dalam tradisi yang ada, sebagian masyarakat menyebut tokoh agama/ulama ini sebagai pimpinan informal.¹⁴

Tokoh agama atau ulama ini bukan hanya memimpin kegiatan keagamaan yang sehari-hari bersifat ritual, melainkan juga aktivitas lain yang mendukung kehidupan sosial masyarakat desa. Seperti halnya yang dikatakan oleh M. Natsir, sebelum masyarakat Indonesia mengenal tokoh pimpinan formal seperti saat ini, masyarakat Islam desa sudah mempunyai dan mengenal pemimpin lokal yang memiliki relasi keagamaan dalam kehidupan sehari-hari yaitu kyai.¹⁵ Dimana pemimpin informal ini menjadi rujukan segala permasalahan yang ada. Semua itu karena adanya kepercayaan yang telah dibangun sejak lama terhadap para tokoh agama.¹⁶ (Natsir 1973, 163)

Sementara itu dalam pemahaman Gramsci, hubungan antara tokoh agama dengan masyarakat berupa hubungan dominasi langsung atau bisa juga hanya sebagai hubungan

¹¹ Keith Dowding, *Power* (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1986), hal. 4-5.

¹² Hutagalung, D. (2004). Hegemoni, Kekuasaan dan Ideologi. *Jurnal Pemikiran Sosial, Politik dan Hak Asasi Manusia*, 74, 1-17.

¹³ Mahadi, U. (2015). KOMUNIKASI POLITIK KIAI PADA KAMPANYE PEMILU. *ADDIN*, 9(2), 229. <https://doi.org/10.21043/addin.v9i2.614>

¹⁴ Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jilid 3, 1987/1988, hal. 989; lihat Juga Azyumardi Azra, “Ulama, Politik dan Modernisasi”, *Ulumul Qur’an*, II, No.7 (1990)

¹⁵ Yafie, Ali “Analisa Perjuangan Ulama di Indonesia”, *Panji Masyarakat*, No. 69 (April 1989) lihat Juga Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren*, (Jakarta: LP3ES, 1982).

¹⁶ Natsir, M., *Capita Selecta*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973) hal 163

Yoga Adi Pradana

hegemoni. Praktik ini dapat terlihat dalam praktik sosial yang dijalankan. Perdebatan tentang kekuasaan tokoh agama yang terjadi menunjukkan bahwa kuasa tokoh agama lebih tepatnya di narasikan dalam pendekatan sosiologis. Meskipun Gaventa menyebutkan dalam tiga ruang kekuasaan, pola relasi kuasa ini juga di kuatkan pada pandangan Steven Lukes yang melihat relasi kekuasaan tetap berfokus pada perilaku aktor sebagai sumber kuasa.¹⁷

Relasi yang terbentuk antara ulama dan masyarakat menyebabkan terjadinya pertukaran sosial. Dimana masyarakat menghormati dan menjadikan panutan. Dari sini posisi ulama semakin tinggi dalam struktur sosial yang ada. Adanya pengaruh secara tidak langsung dengan menghargai dan menghormati para ulama, menunjukkan kekuasaan yang terbentuk tidak lahir begitu saja.¹⁸ Semua ini karena perilaku sosial ulama yang senantiasa hidup berdampingan menjaga keteraturan nilai serta norma agama yang ada. Ini terjadi dalam kurun waktu yang lama dimana tindakan sosial yang dilakukan tidak memiliki tendensi pamrih.¹⁹ Oleh karena itu, kekuasaan yang terbentuk memiliki otoritas serta pengaruh dengan sendirinya.

Kekuasaan politik tokoh agama menciptakan konfigurasi baru di dalam pemetaan politik lokal. Perwujudan ini terjadi di beberapa daerah yang menyelenggarakan pemilukada serentak tahun 2020. Seperti halnya petahana yang maju kembali untuk dapat menjadi pemimpin daerah.²⁰ Konfigurasi politik lokal nampak ramai diperbincangkan, khususnya yang ada di Kabupaten Malang. Tsunami politik yang melanda Malang Raya tentu berdampak pada keterlibatan ulama yang sangat dominan. Keterlibatan itu dengan memegang kendali atas kekuatan sosial serta politik di daerahnya. Oleh karena itu tidak jarang ulama ini menentukan kemenangan atas para elit lokal yang mencalonkan diri ikut dalam Pemilukada.

Tulisan ini menganalisis hasil dari adanya jaring aspirasi masyarakat Kabupaten Malang dalam menyambut pemilukada serentak 2020. Dimana hasil yang ada menyebutkan bahwa keterlibatan elit lokal yang memiliki afiliasi agama dapat menentukan besaran dukungan serta partisipasi pemilih. Secara tidak langsung ini dikhususkan pada ulama yang memberikan dukungan serta ulama yang terlibat langsung dalam pencalonan pemimpin daerah. Sejatinya hanya menjelaskan relasi kekuasaan tokoh agama yang merupakan elit politik lokal. Dimensi tersebut membantu penulis untuk dapat menemukan pemetaan ulama dan para aktor politik yang berperan. Menemukan situasi dan kondisi yang melatarbelakangi serta adanya perubahan-perubahan sosial politik yang akan muncul. Selain itu tulisan ini juga menambah kajian tentang kekuasaan yang bersumber dari kekuatan elit politik lokal yaitu tokoh agama dengan perspektif yang dikembangkan oleh John Gaventa tentang kubus kekuasaan.

¹⁷ Steven Lukes, *Power: A Radical View* (London: Palgrave Macmillan, 2005), hal. 19.

¹⁸ Hannan, A., & Abdillah, K. (2019). *HEGEMONI RELIGIO-KEKUASAAN DAN TRANSFORMASI SOSIAL*. Sosial Budaya, Volume 16, Nomor 01, Juni 2019, pp. 9 - 24

¹⁹ Graaf, H.J. de "Southeast Asian Islam in the Eighteenth Century", dalam P. M. Holt, Ann K. S. Lambton, dan Bernard Lewes (eds.) *The Cambridge History of Islam*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1970)

²⁰ Nuryansah, M. (2014). TRANSFORMASI KYAI MENJADI POLITISI. *Islamic Review : Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, Vol 3 No 1 (2014): *Islamic Review : Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, 233–242.

METODE

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan di dasarkan pada hasil akhir sebuah survey politik tentang jarring aspirasi masyarakat. Dalam menulis artikel ini, bukan hasil secara kuantitatif yang di dorong menjadi metode melainkan hanya menggunakannya sebagai langkah awal untuk menganalisa secara kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan penulis sebagai cara berfikir, dimana menyelidiki dan mentafsirkan bentuk-bentuk dimensi kekuasaan politik Ulama. Selain itu studi ini berupaya melakukan eksplorasi terhadap dimensi kekuasaan Ulama di Kabupaten Malang sebagai figur yang menentukan kemenangan calon pemimpin daerah, serta figure elit politik lokal yang mencalonkan diri maju dalam kontestasi politik. Untuk mencapai tujuan ini, dalam memilih hasil serta mendapatkan data, studi ini menerapkan frame intrinsik yang secara teratur dimulai dari hasil wawancara dan hasil survey yang sudah di identifikasi.²¹ Kabupaten Malang dipilih karena para figure elit lokal yang maju dalam kontestasi politik merupakan figur yang sama yaitu dengan latar belakang agama. Selain itu penulis juga menggunakan data sekunder yang bersumber dari hasil tulisan serta berita yang ada berkaitan dengan pemilu Kabupaten Malang. Tulisan ini adalah momentum yang baik dalam memberikan pemahaman tentang kekuasaan yang dibentuk oleh Ulama. Dimana figur tokoh agama yang berkontestasi memiliki pengaruh penting dalam membentuk jaringan serta besaran partisipasi pemilih tanpa adanya politik uang. Oleh karena itu peneliti menggunakan teori Kekuasaan Powercube sebagai lensa akademik.

Kabupaten Malang

Kabupaten Malang merupakan wilayah terluas kedua di Provinsi Jawa Timur dan merupakan populasi tersebar untuk penduduknya. Kabupaten ini terletak dibagian selatan pulau Jawa, dimana berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Sebagian besar wilayahnya merupakan pegunungan yang berhawa sejuk serta menjadi destinasi wisata unggulan. Selain itu kabupaten ini juga tidak lepas dari cerita masa lampaunya adanya Kerajaan Singhasari dengan rajanya Ken Arok dan Ken Dedes sebagai wanita tercantik yang melahirkan raja-raja dunia. Wilayah Kabupaten Malang terdiri dari 33 kecamatan yang di dalamnya terdapat beragam sektor kehidupan, mulai dari pertanian, perkebunan dan peternakan.

Penduduk mayoritas di kabupaten Malang adalah muslim yang masih sangat tradisional. Ini ditunjang dengan masih banyaknya kegiatan-kegiatan kebudayaan yang berkaitan erat dengan pemaknaan simbolisasi agama. Oleh karena itu masyarakat disini masih melestarikan warisan budaya leluhur dengan nilai-nilai agama yang dipegang teguh. Saat ini Kabupaten Malang dipimpin oleh Bupati yang merupakan ulama dari NU yang pada waktu pemilihan lalu maju berkoalisi dengan petahana dengan mesin partai Golkar dan PKB. Namun saat ini

²¹ Stake, Robert E, 2005. *The Art of Case Study*, London: Sage Publication, Inc

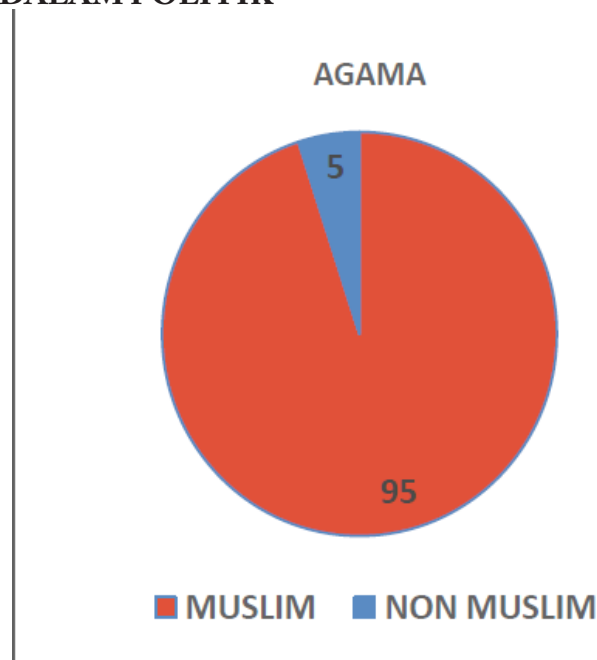
Yoga Adi Pradana

dikarenakan adanya rekomendasi yang tidak pasti, Bupati petahana ini menyeberang ke PDIP dan keluar dari PKB.²²

Dari adanya perpindahan ini, menyebabkan para tokoh agama yang pada awalnya mendukung merasa di khianati. Untuk itu para figur politik lokal yang sebagian besar para ulama dengan afiliasi NU berbondong mencalonkan diri serta berebut rekomendasi PKB untuk maju dalam pemilukada Kabupaten Malang 2020. Petahana yang menyeberang partai tidak serta merta mulus dalam melanggengkan kekuasaannya. Karena yang akan menjadi lawan politiknya adalah figur dengan latar belakang yang sama.

HASIL DAN DISKUSI

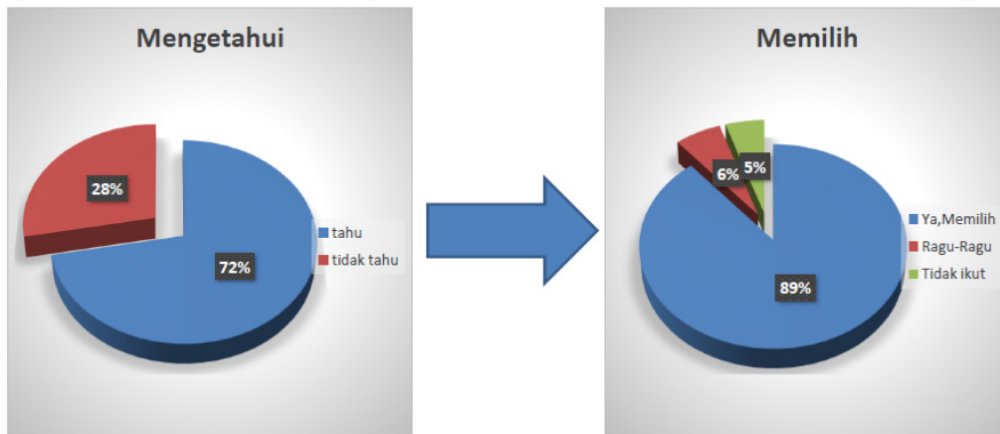
GAMBARAN AWAL HASIL SURVEY DIMANA AGAMA MENJADI FAKTOR DALAM POLITIK



Gambar 1 Faktor Agama

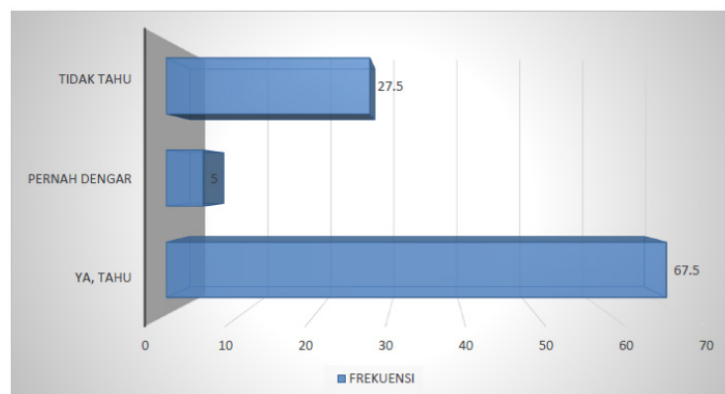
Masyarakat menjadi figur dominan yang menentukan kemenangan tokoh dalam kontestasi politik. Karena dalam sistem demokrasi yang dibangun, masyarakatlah yang dapat memilih tokoh tersebut untuk menjadi pemimpin daerah. Dalam melihat problematika yang ada, memilih tokoh dalam pemilukada tidak lepas dari latar belakang agama pemilih. Sebagai mana yang menjadi indikator *pertama* adalah agama. Agama merupakan hal yang sakral serta bersifat private, dimana hubungan manusia dengan Tuhan menjadi dasar utama. Sebagian besar responden dalam survey ini adalah masyarakat beragama, dengan 95 % muslim dan 5 % lainnya non-muslim.

²² <https://www.malang-post.com/berita/detail/pkb-kocar-kacir/20-februari-2020> diakses 22 maret 2020



Gambar 2 Partisipasi Masyarakat

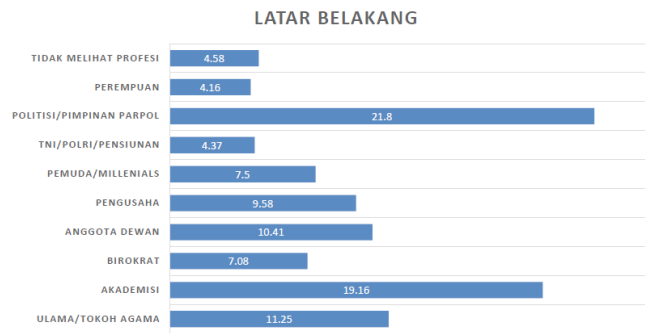
Kedua, tingkat partisipasi masyarakat juga dilihat sebagai bentuk pemahaman memilih dalam menentukan tokoh pilihannya. Dari hasil yang ada diketahui bahwa mayoritas 72 % masyarakat di Kabupaten Malang sudah mengetahui akan diadakan pemilihan kepala daerah pada September dan 28 % belum mengetahui. Hal ini menunjukkan bahwa proses keterlibatan masyarakat masih ada yang pasif dengan menunggu informasi dari institusi daerah dalam upaya memberikan sosialisasi terhadap mekanisme pemilihan. Dalam tingkat partisipasi untuk memilih, sebagian besar masyarakat yang sudah mengetahui mereka akan datang pada saat proses pemilihan yakni 89% dan sisanya masih ragu-ragu dalam memilih. Melihat realita ini dapat dijelaskan bahwa masyarakat masih dapat berubah pilihan.



Gambar 3 Pandangan Masyarakat Terhadap Nama Calon

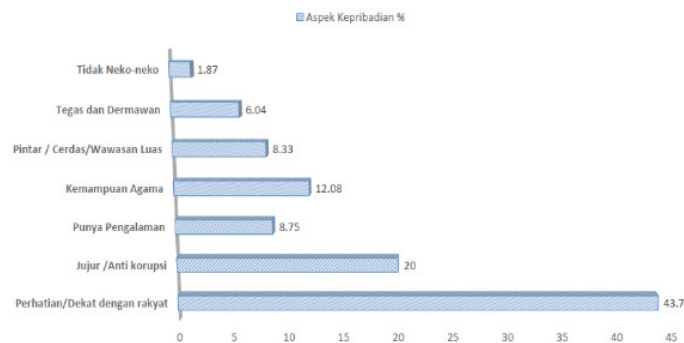
Ketiga, pandangan masyarakat berkenaan dengan tahu serta tidaknya pada pengenalan nama-nama figure yang sudah bermunculan. Ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah merespon baik terhadap para kandidat calon pemimpin daerah. Partisipasi masyarakat bukan hanya pada saat mekanisme pemilihan melainkan juga pada saat nama sudah muncul di media dan diketahui oleh publik. Dari 480 responden yang ditetapkan diketahui 67,5 % sudah mengetahui nama-nama kandidat yang akan maju dalam pemilu kabupaten Malang

2020. Dan 5% pernah dengar, sedangkan 27,5% tidak mengetahui.



Gambar 4 Latarbelakang Calon Pemimpin

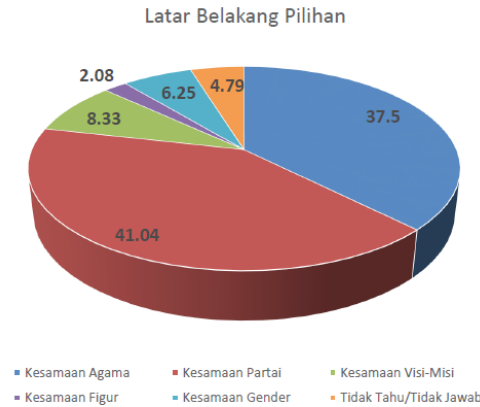
Keempat, keterlibatan masyarakat dalam memilih juga dilihat dari pemahaman mereka terhadap latarbelakang calon pemimpin. Sebanyak 21,8 % masyarakat menginginkan politisi atau pimpinan partai politik, dan 19,16 % menginginkan figure akademisi. Ketika agama dijadikan pedoman masyarakat bukan hanya pada tataran sakral, terbentuklah nalar politis para pemilih. Ada 11,25 % responden yang menginginkan ulama/tokoh agama menduduki jabatan politis. Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat masih memperhatikan faktor agama sebagai nalar berfikir utama.



Gambar 5 Aspek Kepribadian

Kelima, melihat figur bukan hanya terbatas dari latarbelakang saja. Terdapat aspek kepribadian yang juga memberikan dampak terhadap tingkat keterpilihan pemimpin daerah. Sebanyak 43,7 % responden menginginkan figur yang dekat dan perhatian kepada rakyat, jujur / anti korupsi dengan 20% dan kemampuan agama 12.08 %. Ini menunjukkan para pemilih masih begitu sangat tradisional dalam memberikan suaranya. Tindakan-tindakan yang bertentangan dengan pemikiran mereka, secara tidak langsung akan hilang tergantikan dengan nilai-nilai kultural di masyarakat.

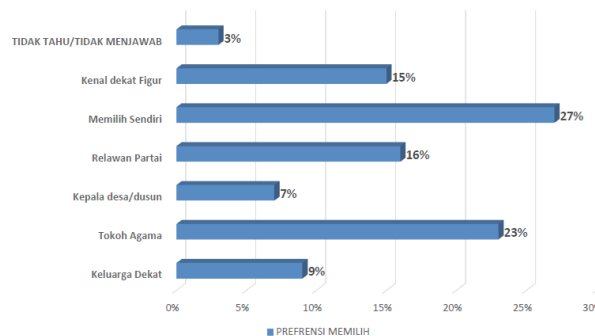
Relasi Kuasa Politik Tokoh Agama dalam Hegemoni Pemilukada 2020



Gambar 6 Latarbelakang Pilihan

Keenam, selain latar belakang figur, latar belakang orang memilih juga menjadi factor penting melihat partisipasi masyarakat. Sebanyak 41,04 % melihat kesamaan partai yang dominan dalam memilih menentukan pilihannya. Pada peringkat kedua, 37,5 % melihat kesamaan agama sebagai nilai dorong untuk memilih figur pimpinan daerah. Selain itu terdapat kesamaan figur, visi-misi dan gender dalam upaya melatarbelakangi masyarakat memilih.

TOKOH YANG BERPENGARUH



Gambar 7 Pengaruh Tokoh Dalam Memilih

Ketujuh, pengaruh tokoh dalam memberikan preferensi pilihan juga memberikan dampak yang positif bagi partisipasi masyarakat. Sebanyak 27 % responden mereka sudah yakin dengan pilihannya sehingga pendapat orang lain hanya dijadikan pembandingan. Selain itu 23 % menyebutkan tokoh agama/ulama merupakan orang yang dapat merubah pilihan mereka. Untuk factor yang lain, responden mengatakan bahwa kepala desa, keluarga serta relawan partai juga memberikan pengaruh terhadap pilihan masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam menentukan pilihan setidaknya terlihat dari hasil yang didapatkan. Membentuk persepsi di masyarakat tidak secara langsung dapat dilakukan. Harus ada mekanisme yang jelas sebagaimana indikator yang muncul pada jaring aspirasi masyarakat Kabupaten Malang menyambut pemilukada serentak 2020.

TOKOH AGAMA: DARI GERAKAN KULTURAL KE POLITIK

Pengaruh tradisi dalam membangun budaya politik memang menimbulkan beragam bentuk kekuasaan. Menurut penjelasan Clifford Geertz (1981) tokoh agama atau ulama ini disebut sebagai *cultural broker*. Ini terjadi karena ulama pada awalnya hanya memiliki gerakan kultural kemudian terlibat dalam politik praktis. Posisi ini menyebutkan, bahwasanya tindakan tokoh agama yang hanya memberikan *doa* serta arahan kemudian terlibat langsung dalam ranah negosiasi politik. Seperti yang ada dalam survey ditemukan, ada tiga tokoh agama dengan latar belakang kesamaan organisasi maju dalam merebutkan rekomendasi partai politik untuk dapat menjadi Calon Bupati. Peran ini sejatinya merubah garis perjuangan tokoh agama seiring perubahan politik masa kini. Seperti yang dikemukakan oleh Yusuf pada wawancara 29 Januari 2020 bahwa,

“...semenjak ganti pemimpin, terus bupati lama kena OTT KPK. Suasana politik di Kabupaten Malang ini *adem ayem*. Tapi setelah pergantian dari wakil ke bupati, sudah mulai bergerilya untuk maju lagi 2020. Awalnya maju di PKB, nunggu lama sampai akhirnya diusung PDI-P dan sekarang menunggu lawan dari PKB ini yang belum ditentukan. Yang maju para tokoh agama NU semua mulai Gus Ali pemilik ponpes di Karangploso, Hasan Abadi yang rektor UNIRA dan Umar Usman ketua PCNU juga dokter. Jadi di *sawang* ya rebutan sesama kader NU dan para *Ulama*.”

Bentuk perubahan yang terjadi menunjukkan adanya kebutuhan yang saling berkesinambungan. Adanya simbiosis mutualisme dalam merealisasikan kebutuhan tertentu demi mendapatkan serta masuk pada kekuasaan yang ada. Menurut salah satu santri yang berasal dari Pondok Pesantren di Kabupaten Malang menyebutkan,

“..minimal kalo ada orang datang kesini,dan butuh sama pak Yai yah kita bisa makan enaklah. Karena orang itu pasti memberi bantuan. Kalo kata santri lain yang sering datang ya para *panggede* (sebutan untuk orang memiliki jabatan), pokoknya pasti ada maunyalah kalo kesini..” (wawancara pada 10 Februari 2020)

Tindakan yang terjadi demikian menunjukkan bahwa kekuasaan tokoh agama memiliki bentuk paten. Ketika ada elit politik yang datang berkunjung, pasti ada transaksi yang terjadi, entah itu dalam bentuk kesepakatan atau hanya legitimasi dukungan. Pola itu terjadi juga dalam kampanye elit yang memanfaatkan langgar sebagai bentuk pertukaran politik. Dimana elit politik mendapatkan legitimasi moral dari kyai kampung atau pemilik langgar.²³ Pada politik praksis, perilaku yang dilakukan tokoh agama memberikan legitimasi dengan memakai nalar agama menunjukkan bahwa agama mampu memberikan kekuatan yang besar bagi elit untuk dapat bergerak mengikuti kontestasi politik. Sehingga yang terjadi para elit merasa agama menjadi profan.

²³ Pradana, M. Y. A. (2019). *RELASI SOSIAL ELIT POLITIK DAN SESEPUH DESA MELALUI LANGGAR DI KABUPATEN MALANG*. Jurnal Sosiologi Agama: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial Volume. 13, Nomor. 1 Januari-Juni 2019 | ISSN: 1978-4457 (cetak) ISSN: 2548-477X (online) | doi: <http://dx.doi.org/10.14421/JSA.2019>.

Meminjam pendapat Peter L. Berger (1991), dikatakan bahwa agama merupakan langit suci yang dapat dijadikan sebuah instrument dalam menguatkan tindakan politik dari seluruh tindakan yang dilakukan manusia. Selain itu bagi Geertz (1981), kyai tidak saja merupakan pemilik otoritas dalam menjalankan kekuasaan di pesantren. Dirinya juga memiliki kekuatan di dalam struktur masyarakat dimana kekuatan itu menjadi suatu hal yang berharga. Pendapat ini sejalan dengan yang dijelaskan Gaventa, bahwa perilaku tokoh agama ini berada dalam dimensi kekuasaan level.

Disisi lain kekuasaan tokoh agama juga di dasari oleh pemikiran Webber tentang kepemimpinan kharismatik yang dimiliki dimana itu terpusat pada kekuatan personal. Pada konteks menuju pemilu Kabupaten Malang 2020, tokoh agama ada *patron* bagi umat serta pengikutnya, dimana hubungan itu menciptakan relasi yang bersifat *paternalistic*. Kemampuan tokoh agama dalam bidang agama menempatkan dirinya sebagai otoritas yang baik dimana nalar agama menjadi utama. Adanya fatwa serta petunjuk yang tokoh agama bagi kepada pengikutnya senantiasa dijadikan pedoman sosial serta politik. Itu juga yang dilakukan oleh para elit politik ketika datang berkunjung menemui tokoh agama. Dengan adanya pengakuan itu, partai politik yang memiliki tokoh agama sebagai bakal calon pemimpin di daerah tidaklah heran karena dalam setiap wilayah yang dituju saat kampanye memiliki pemilih.²⁴

Pada masyarakat yang masih memegang tradisi, perilakunya senang akan hal yang bersifat tradisional. Petuah para tokoh agama ini mensegmentasi pemikiran masyarakat lokal. Dengan begitu masyarakat dapat memenuhi apa yang menjadi keinginan tokoh agama. Gejala politik tokoh agama ini juga menjadi permasalahan beberapa pihak yang juga ada menyayangkan bahwa tokoh agama yang disukainya mendadak kehilangan wibawanya ketika gagal menjadi calon anggota DPRD di Kabupaten Malang, dijelaskan oleh Anas bahwa,

“gagalnya kyai dalam politik juga tidak lepas dari kemampuan finansial yang dimiliki, sejatinya cost politik yang besar tidak bisa menutup semua kebutuhan kyai tersebut untuk terus maju menjadi anggota dewan. Bahkan saya sendiri yang merupakan kader NU dan ikut PKB dan sudah minta restu para Ulama juga gagal.”(wawancara, 8 Februari 2020)

Kegagalan tokoh agama dalam politik seperti yang dijelaskan bahwa semua itu terlebih pada kemampuan ekonominya. Ketertinggalan tokoh agama dalam melakukan akses ekonomi juga tidak jarang membuat beberapa kyai kesusahan menutup biaya operasional yang ada dalam pondok pesantren. Oleh karena itu tidak heran, banyak tokoh agama yang tergiur untuk melakukan politik praktis dengan mengiyakan permintaan elit politik untuk menjadi penasihat spiritual. Disinilah sering terjadi perbedaan paham antara tokoh agama dan elit politik. Ketidakmampuan tokoh agama dalam manajemen konflik yang ada juga menyebabkan kyai atau ulama ini kehilangan kesakralannya. Seperti yang pernah terjadi

²⁴ Pradana, M. Y. A. (2020). Elite Rationality, Traditions and Pragmatic Politicians. *Journal of Politics and Policy Volume 2, Number 2, Juni 2020*.

Yoga Adi Pradana

pada Ustad Abdul Somad yang kondang di televisi dan merupakan bagian dari pegawai negeri sipil mulai masuk dalam politik dengan mendukung salah satu calon presiden. Pada akhirnya banyak kajian beliau yang dibatalkan dan di bubarkan oleh kelompok lain yang berseberangan.²⁵

TOKOH AGAMA SEBAGAI AKTOR KUASA

Tokoh agama yang merupakan elit lokal selalu mendapatkan tempat dalam ruang sosialnya, terutama dalam ruang sosial politik. Kemampuan serta pengalaman yang telah di dapatkan merupakan modal sosial elit dalam mempengaruhi orang lain. Oleh karenanya para pemimpin daerah selalu memanfaatkan keterpopuleran para ulama tersebut untuk meraup suara masyarakat dan membangun jaringan hingga level bawah. Bahkan tidak jarang partai politik juga memanfaatkan ulama sebagai mesin utama dalam pemilukada atau calon yang diusung. Dalam masyarakat sering dijumpai adanya figur ulama yang memiliki pengaruh dimasyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh Aris pada 10 Januari 2020 bahwa :

“...saya nanti ikut memilih bupati, tinggal menunggu arahan tokoh masyarakat sekitar atau pak yai (kyai), nanti kalo ndak ngikut pak yai, malah bingung. Karena biasanya pak yai datang kerumah-rumah sambil njangong (silaturahmi) ya kadang juga ngajak calonnya. Ya kadang juga dapat sanga tapi kalo minta sungkan..”

Tokoh agama yang sering di sebut Pak yai (kyai) di desa inilah bentuk dari adanya pengaruh individu dalam membentuk respon positif di masyarakat. Dalam pemahaman yang ada, tokoh agama atau ulama desa inilah yang disebut elit.²⁶ Pandangan lain menyebutkan menurut Laswell, elit adalah mereka yang memiliki serta mendapatkan lebih dari apa yang dimiliki serta di dapatkan orang lain. Sementara itu Pareto menambahkan bahwa elit ada yang memegang kekuasaan dan diluar kekuasaan.²⁷

Pada perkembangannya, tokoh agama tidak saja mengajar dan terlibat langsung dalam kehidupan masyarakat kecil baik di pesantren ataupun jaringan sekitarnya. Tidak sedikit saat ini para tokoh agama menjaditokoh politik, pemimpin daerah, Menteri bahkan pernah menjadi Presiden. Secara umum tokoh agama menjalankan jaringannya masuk dalam struktur organisasi keagamaan, sebut saja Nahdathul Ulama dan Muhammadiyah. Secara tidak langsung afiliasi politiknya masuk kedalam struktur Partai Politik yang memiliki basis keduanya.

Selain itu, tokoh agama juga berperan dalam tataran elit yang memiliki sumber ekonomi tinggi. Seperti yang dijelaskan oleh Wawan masyarakat Bululawang yang tinggal dekat Pondok

²⁵ <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/17/12/28/p1moo7257-ustaz-abdul-somad-dicekal-pbnu-pemerintah-harus-jelaskan> diakses 24 maret 2020

²⁶ Kartodirdjo, Sartono (ed.), *Pesta Demokrasi di Pedesaan* (Yogyakarta: Aditya Media, 1992)

²⁷ SP. Varma, *Teori Politik Modern*, terj. Yohannes Kristiarto, dkk. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)

Pesantren An-Nur Kabupaten Malang. Dijelaskan bahwa,

“...minta bantuan kepondok iku yo cepet mas, opo maneh ono sing kesusahan trus mau bikin kegiatan di desa. Kalo disini pak Yai X itu loman banget “ (wawancara narasumber 10 Februari 2020)

Tindakan yang dilakukan oleh tokoh agama di lingkungan sekita juga menunjukkan betapa besar dan peran serta dirinya membangun relasi dimasyarakat. Dimana itu merupakan dimensi kekuasaan pada tataran level. Yang menganggap bahwa tokoh agama memiliki sumber finansial tinggi. Pengaruh tokoh agama sebagai figur yang diperhitungkan partai politik nampak dalam hasil survey yang ada. (*lihat table ulama lebih disukai*) Jaringan masyarakat lokal menangkap apa yang dilakukan oleh partai merupakan bentuk pragmatisme politik. Seperti yang dikatakan oleh salah satu kepala dusun di Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang mengatakan bahwa,

“ dhateng mriki niku tiyang-tiyang seneng dumateng calon saking pondok, tirosipun kathah ingkang maju gantos pak Rendra. Sing penting mas ora korupsi trus ngerti butuhe rakyat “ (hasil wawancara dengan narasumber, 10 Februari 2020)

(disini ini orang-orang suka kepada calon yang berasal dari pondok, katanya banyak yang maju menggantikan pak Rendra. Yang penting jangan korupsi dan mengerti kebutuhan rakyat)

Pendapat yang dikatakan masyarakat itu merupakan sebuah modal sosial yang dimiliki seorang tokoh agama, dimana latar belakang pondok dan citra di masyarakat membuat sebagian orang yakin bahwa dirinya tidak korupsi. Karena pasti takut dengan agama dan Tuhan. Meskipun tradisi politik sarung saat ini menjadi alternatif pilihan elit dengan latar belakang berbeda. Melihat realitas yang ada, performa politik para ulama ini juga tidak kalah dengan para figur partai. Para ulama dinilai cukup memiliki aura politik yang menarik. Oleh karena itu banyak yang memprediksi dan menebak strategi kampanye yang digunakan. Dalam pemahaman teori powercube yang dijelaskan Gaventa, kekuasaan tokoh agama yang ada berada dalam dimensi level. Oleh karena tokoh agama ini menjadi elit lokal yang memiliki dukungan politis untuk dapat mencalonkan diri dan di calonkan oleh partai politik.

TOKOH AGAMA MEMBANGUN RELASI JARINGAN

Pemilukada Kabupaten Malang yang akan digelar serentak pada bulan September ini harus diundur karena adanya wabah Covid-19. Dengan begitu partai politik yang sudah memiliki calon untuk diusung merasa seharusnya masih bisa untuk memilik calon alternative. Inilah yang saat ini di lakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Bepindahnya kandidat terkuat yang merupakan petahana tentu menimbulkan konflik secara internal terlebih, sang calon menyeberang ke PDI-Perjuangan.²⁸

²⁸ <https://www.malang-post.com/berita/detail/pkb-kocar-kacir/20-februari-2020>

Yoga Adi Pradana

Banyaknya kemenangan para elit politik tidak lepas dari penguasaan elit terhadap jaringan lokal yang ada di wilayahnya terutama tokoh agama dan para santri. Dalam konteks Powercube Gaventa, partai politik merupakan bentuk kekuasaan yang ada atau terlihat. Dimana kekuasaan itu merupakan bentuk legitimasi negara dalam sistem demokrasi saat ini. Tentu saja dengan aktor politik yang menjalankan pergerakan partai. Mulai dari pusat hingga ke tataran *grassroot*.

Pada tahapan ini para tokoh agama yang memiliki kemampuan politik serta finansial cukup berlomba untuk mendapatkan rekomendasi partai politik. Seperti yang ada di Kabupaten Malang saat ini. Beberapa tokoh agama sudah mulai mencari simpati masyarakat dengan latar belakang keilmuannya masing-masing. Dengan syarat harus mendapatkan dukungan 20% suara jumlah anggota DPRD, sejatinya *cost politic* ini dibutuhkan sebagai bentuk mencari dukungan. Tidaklah heran pada momentum ini, para elit politik saling jual mahal untuk dukung mendukung.

Melihat fenomena ini, kekuasaan tokoh agama yang ingin maju harus melalui tahapan verifikasi oleh partai politik. Dengan dukungan yang kuat keatas, tokoh agama memiliki potensi untuk mendapatkan rekomendasi pusat. Powercube menjelaskan, kekuasaan pada wilayah politik lokal ini di petakan dalam tiga kondisi dimana saling keterkaitan. *Pertama*, tentang kekuasaan yang terlihat. Praktek politik tokoh agama sudah terlihat dari struktur sosial yang dimiliki serta dibangun di masyarakat. Kemampuan tokoh agama membangun jaringan tidak hanya menguatkan posisi secara politik. Namun juga secara sosial ekonomi yang memandang tokoh agama memiliki derajat tinggi. Oleh karena itu tidak jarang bahwa dengan kekuasaannya yang terlihat, tokoh agama sering di datangi serta dimintai pendapat dan restu apabila ada kebijakan yang di realisasikan.

Kedua, tokoh agama memiliki kekuasaan yang tidak terlihat. Posisi ini sudah terjadi dalam beragam kontestasi politik. Tokoh agama memiliki kemampuan lebih yang tidak dimiliki oleh kebanyakan masyarakat. Biasanya para tokoh agama ini begitu di sakralkan karena kemampuan diluar nalar ini dalam melihat kejadian politik. Strategi ini justru yang sering dimanfaatkan oleh para figur politik untuk menguatkan atas majunya dalam pemilihan. Ini termasuk juga mengajak tokoh agama dalam menentukan tokoh siapa yang di usung oleh partai politik menjadi calon pemimpin.

Ketiga, tokoh agama memiliki kekuasaan tersembunyi untuk dapat menentukan kepastian siapa figur yang diusung dalam pemilihan. Selain itu posisi tokoh agama menggambarkan kepastian dukungan yang akan diperoleh nantinya. Seperti yang dijelaskan oleh Supono bahwa, "...dalam dukungan kita hanya ngikut pimpinan, disini yang dihormati salah satunya pak yai yang memiliki pondok pesantren itu. Kalo ada rame-rame politik pasti kita langsung diberi. Memang bukan pak yai langsung tapi katanya semua itu dari beliau." (wawancara narasumber 12 Februari 2020)

Tindakan yang dilakukan oleh tokoh agama menunjukkan peran dalam menentukan sumber-sumber kekuatan bagi partai politik dalam memenangkan kandidat yang diusung pada pemilu. Ini semua terkait dengan keuntungan yang didapatkan serta posisi yang dimiliki sebagai bentuk kekuasaan antara aktor politik dan pemilih.²⁹

KUASA POLITIK TOKOH AGAMA

Pancasila hidup dan berkembang dalam berbagai macam pandangannya. Ini terlihat dari sila 1 yang mendasari sila-sila berikutnya. Nilai ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat Indonesia akan agama melandasi setiap pola kehidupan secara sosial maupun politik. Di sisi lain, kehidupan berpolitik dan negara tidak dapat berjalan tanpa masyarakat beragama. Kehidupan politik ini tercermin dari adanya nilai agama yang dijadikan dasar ideologis terbentuknya partai politik. Menurut Gunter W Remmling (1976), melihat agama dan politik sebagai dua nilai yang memiliki kesan tolak belakang namun keduanya memiliki peran sosial sebagai alat pertukaran di masyarakat. Agama adalah moralitas bagi masyarakat menjalankan kehidupan dimana ada aturan, nilai dan norma yang melandasi. Sedangkan politik selalu identik dengan kekuasaan dan kebijakan yang dibuat.

Sebagai contoh yang terjadi di negara muslim. Tokoh agama/ulama memiliki peran penting dalam mengamati dinamika politik di sana. Meskipun peran tokoh agama berbeda saat itu dengan kekuasaan Islam beberapa abad yang lalu. Namun ada satu peran yang tidak bisa ditinggalkan bahwa tokoh agama merupakan benteng moral yang ada di masyarakat. Oleh karena ini posisi tokoh agama ini memiliki potensi politik yang sangat besar. Posisinya di rasa bisa memberikan legitimasi terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Dan tidak jarang para tokoh agama diajak untuk bersama mempertahankan stabilitas pemerintahan, mendeligitimasi pemerintah dan memimpin revolusi.³⁰

Pendapat lain menyebutkan bahwa Kiai sebagai patron masyarakat sangat menentukan arah dukungan pada pemilihan umum dan kedudukannya sebagai elit lokal dan juga memimpin pesantren. Kiai juga merupakan tokoh agama dan sebagai agen sosialisasi politik, sehingga secara otomatis tidak bisa lepas dari kepentingan politik seperti diketahui bahwa sosialisasi politik merupakan suatu proses sosialisasi sejak dini yang di dalamnya melibatkan keluarga, sekolah dan juga tokoh agama.³¹

Tokoh agama atau ulama dalam tatanan yang ada di masyarakat memiliki pengaruh yang besar. (Salehudin, 2016) Dalam tatanan yang ada, tokoh agama tidak ubahnya guru bisa secara formal maupun informal karena sebagian memiliki pondok pesantren. Pada wilayah praksis, pengaruh tokoh agama ini diperhitungkan saat pemilu berlangsung. Kemampuan tokoh

²⁹ Gaventa, John, "Finding The Spaces for Changes; A Power Analysis", *IDS (Institute of Development Studies) Bulletin*, Vol. 37, No. 6 (November 2006)

³⁰ Aswar, H. (n.d.). *Pengaruh Ulama Dalam Politik Di Negara Muslim: JURNAL ILMU SOSIAL INDONESIA*, VOL.2,NO.1,Maret 2015 hal 85-102.

³¹ Rush, M. & Althof, P. 2007. *Pengantar sosiologi politik*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Yoga Adi Pradana

agama yang memiliki posisi terhadap santri dan jamaahnya dirasa berdampak besar. Seperti yang dijelaskan oleh Anas Muhammad, simpatisan NU Kabupaten Malang bahwa,

” para ulama punya posisi yang cukup besar dalam pemilihan bupati mendapatkan, terbukti dari nama-nama yang ada banyak tokoh NU baik dari masing-masing organisasi yang ada. Setiap tokoh punya banyak pengikut, ini yang menarik dilihat namun tetap pada memperhatikan kebaikan organisasi juga.” (wawancara narasumber, 8 Februari 2020)

Kemampuan tokoh agama untuk berpotensi sebagai pemimpin daerah sejatinya terlihat bukan hanya kali ini saja. Kejadian yang terjadi di Kabupaten Malang merupakan bagian kecil. Sehingga dalam pemilukada, tokoh agama ataupun kyai ini menjadi acuan bagi masyarakat umum / santri untuk menentukan pilihan. Selain itu juga partai politik juga dimudahkan dengan adanya sumber kekuatan pribadi yang dominan. Sudah banyak ditemui dalam pemilu atau pemilukada, kekuatan tokoh agama/kyai sering di datangi para elit politik hanya untuk menanyakan arah dukungannya. Inilah yang terjadi sebagai bentuk kekuasaan tokoh agama dalam politik. Melihat tokoh agama dalam politik, setidaknya bisa di katakan bahwa alasan dipilihnya tokoh agama ada dua hal, pertama tokoh agama memiliki kepribadian yang di segani masyarakat sehingga posisinya menjadi kuat. Kedua, tokoh agama biasanya lahir serta hidup dalam struktur sosial tinggi atau dalam kalangan berada.³²(Turmudi, 2004:95)

Pemahaman inilah yang terjadi dalam kontestasi politik lokal dimana kekuatan tokoh agama/ulama membentuk relasi kekuasaan bagi para pengikutnya. Seperti halnya yang ditemukan dari hasil wawancara pada 20 Januari 2020, menurut Muklis :

“ ...sekarang kabupaten malang bingung mencari calon yang pas, yang terpenting ya dekat dengan masyarakat kecil, ya jujur, ya baik orangnya, pokok yang saya pilih sesuai dengan agama dan orangnya juga paham tentang agama..”

Pendapat ini menekankan, selain pemahaman nilai dan norma yang biasa terjadi di masyarakat. Faktor agama juga menjadi dorongan yang muncul sebagai bentuk penegasan atas agama yang diyakini. Cara lain pun pernah terjadi ketika ada institusi agama yang mengeluarkan fatwa haram suatu agama terkait dalam pilihan golongan putih. Ini dilakukan dalam rangka membentuk identitas politik bagi agama tertentu. Oleh karena itu banyak elit politik berlomba menjadi pemimpin yang identik dengan nilai agama sebagai strategi utama.

Sebagai patron, politik tokoh agama menjadi salah satu elit politik yang ditunggu sikap politiknya pada pemilukada, sehingga perlu untuk menyikapi perkembangan politik yang sedang berlangsung. Biasanya cara yang dilakukannya menggunakan mimbar atau panggung politik, seiring berkembangnya teknologi pola yang dilakukan berbeda. Perkembangan teknologi menjadi alternatif untuk menyampaikan sikap kiai dalam mendukung paslon dan mempengaruhi partisipasi pemilih, penggunaan media sosial sebagai sarana sosialisasi.³³

³²

³³ Rush, M. & Althof, P. 2007. *Pengantar sosiologi politik*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

TOKOH AGAMA: HEGEMONI BARU PEMILUKADA

Sebagian besar kuasa tokoh agama menunjukkan bahwa perilaku yang dilakukan menjadi sangat politis. Seperti yang dijelaskan oleh Gramsci tentang hegemoni pada saat Revolusi Bolshevik menunjukkan bahwa jantung perjuangan politik harus memainkan peran utama dalam melakukan tindakan control terhadap kuasa yang dibangun hingga terciptanya kelas.³⁴ Tindakan tokoh agama ini nampak pada kegiatan pra pemilihan hingga pasca pemilihan. Seting agenda yang dilakukan tokoh agama dengan membuat kajian keagamaan memudahkan berjalannya ruang kekuasaan yang dijelaskan oleh Gaventa. Politisasi nilai-nilai ceramah yang dilakukan dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat karena dianggap mudah dicerna.

Tokoh agama dalam pemahaman Gramsci tentang hegemoni dianggap sebagai orang intelektual, yang memainkan peran penting dalam wilayah produksi kekuasaan. Wujudnya tokoh agama membuat nilai-nilai ceramah yang di dekatkan pada salah satu kandidat. Pendapat ini sesuai dengan yang dikatakan oleh, Muhamad Nuraini pada wawancara 20 Januari bahwa :

“ karena yang maju jadi bupati itu teman satu kelompoknya yang secara gak langsung pasti akan terus dibawa kemana-kemana. Setiap ceramah isinya dukung mendukung..”

Komunikasi ini terbentuk dari adanya simpati pada salah satu calon dengan memilikitar belakang yang sama. Fenomena ini memang awalnya dianggap biasa oleh sebagian masyarakat, namun lambat lain semakin terlihat bahwa tokoh agama ini sedang melakukan kegiatan politik untuk pemilu. Lebih jauh lagi, apa yang dilakukan tokoh agama ini menjadikan masyarakat mudah untuk tersubordinasi satu sama lainnya. Pada titik ini, Roger Simon menjelaskan bahwa hegemoni tidak terbatas pada hubungan yang mendominasi dengan cara kekerasan namun dapat melalui persetujuan dari aktor-aktor politik.³⁵ Dalam pemahamannya ini, tentang bagaimana kepemimpinan politik tokoh agama dalam mengorganisir kesepakatan atau persetujuan masyarakat.

SISI DILEMATIS TOKOH AGAMA BERPOLITIK

Dalam kontestasi politik yang ada, kekuasaan tokoh agama sebenarnya tidak terbatas tiga rumusan yang dijelaskan oleh Gaventa. Ada hal lain yang dapat dilakukan ketika kekuasaan tokoh agama menjadi alternatif pilihan dengan mengedepankan moral agama. Tokoh agama menjadi klaim atas kebenaran politik yang ada. Bukan dalam ranah yang terlihat, tidak terlihat dan tersembunyi. Namun semua itu berada dalam ranah etis dan non etis. Peran tokoh agama yang sudah berafiliasi pada partai politik masuk ke dalam ranah etis dan non etis.³⁶ Pendapat ini seperti yang dikemukakan oleh Anas Muhammad yang berpendapat bahwa,

³⁴ Jeremy Lester, *Dialogue of Negation: Debates on Hegemony in Russia and the West* (London: Pluto Press, 2000), hal. 31.

³⁵ Roger Simon, *Gramsci's Political Thought: An Introduction* (London: Lawrence and Wishart, 1982) hal 21

³⁶ Nuryansah, M. (2014). TRANSFORMASI KYAI MENJADI POLITISI. *Islamic Review : Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman, Vol 3 No 1 (2014): Islamic Review : Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, 233–242.

Yoga Adi Pradana

“Ulama gagal politik itu wajar terjadi, yang dikuasai sepenuhnya hanya jamaahnya sendiri, ketika menginjak daerah lain dengan kondisi politik yang tidak stabil, yang ada hanya bakal di jadikan bercandaan oleh orang. Takutnya sih begitu..”(wawancara narasumber, 8 Februari 2020)

Kemampuan yang dimiliki tokoh agama tidak serta merta memuluskan langkahnya maju dalam kontestasi politik. Sebagaimana memainkan pola-pola yang digunakan sebagai strategi politik. Pada konteks pemilukada Kabupaten Malang, elit politik yang merupakan tokoh agama banyak memainkan peran dalam ruang terbuka dan tertutup. Pada ranah tertutup, tokoh agama yang gagal untuk mendapatkan rekomendasi partai politik berpeluang menjadi tim sukses secara tidak langsung dengan mengakomodir para kelompok masyarakat yang berada dalam struktur kekuasaannya. Mencoba untuk membentuk dukungan dengan mengkampanyekannya secara diam-diam tanpa dicurigai oleh jamaahnya sebagai bukti dukungan.

Peran ranah terbuka jelas ditunjukkan oleh tokoh agama yang mendapat rekomendasi partai politik yang diusung maju dalam pemilihan. Secara moral tokoh agama tersebut harus siap mendapatkan segala bentuk tindakan politis. Sebagai tokoh agama yang dipandang baik etika dan moralnya, dirinya dapat dengan mudah jatuh apabila kekuasaannya tidak dijalankan sesuai dengan bentuk tindakannya yang di dasarkan pada nalar agama yang berjalan. Jangan sampai nalar agama yang dapat dijadikan program politik dihilangkan dan kemudian diganti dengan kekuasaan politik. Sebab tokoh agama yang memiliki kharismatik kuat bisa saja hilang tidak akan dianggap oleh masyarakatnya sebagai pengikut apabila sudah menjadi elit pragmatis.³⁷(Pradana, 2020)

Pada tahapan yang terjadi apabila tokoh agama tersebut gagal. Simbol tokoh agama yang sakral dan begitu dihormati oleh jamaahnya menjadi hilang begitu saja. Permainan politik yang terjadi tidak saja menghilangkan citranya sebagai seorang ulama. Namun institusinya yang berada dibelakang terkait juga. Moral politik tokoh agama seharusnya dapat dinikmati pada peran pemuka agama, guru spiritual dan guru akademis. Nilai-nilai dasar tokoh agama yang bertindak sebagai pemimpin menjadi landasan kebaikan pada wilayah sosial keagamaan. Karena pada akhirnya tokoh agama bukan berafiliasi serta punya orientasi kekuasaan, melainkan politik moral etis.

³⁷ Pradana, M. Y. A. (2020). Elite Rationality, Traditions and Pragmatic Politicians. *Journal of Politics and Policy Volume 2, Number 2, Juni 2020.*

SIMPULAN

Pengaruh agama dalam menentukan tingkat keberhasilan partai politik mengusung kepala daerah memang tidak bisa dilepaskan begitu saja. Dengan adanya tokoh agama yang masuk dalam politik praktis tentu tidak bisa dilepaskan dari kekuasaan yang dimiliki. Melihat fenomena pemilu Kabupaten Malang 2020 nampaknya memberikan peluang untuk para tokoh agama atau ulama bisa maju mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Semua itu didasarkan pada mekanisme dukungan partai politik. Dalam membangun relasi kekuasaannya tokoh agama menjadikan kekuatan personal sebagai modal awal terjun di dalam politik. Popularitas dari para jamaahnya merupakan jaminan ketika ingin mencalonkan diri. Selain itu kekuasaan tokoh agama juga bersumber dari status sosial yang lahir dari pengakuan masyarakat. Dimana tokoh agama tidak hanya memiliki kemampuan akademis tinggi namun juga finansial yang cukup.

Sebagai elit politik lokal yang memiliki bentuk kekuasaan, tokoh agama di Kabupaten Malang juga nampak membangun jaringan pada organisasi politik serta keagamaan. Kekuasaan ini menunjukkan bahwa tokoh agama berada pada level, bentuk serta ruang yang sejalan dengan pergerakan politik praksis. Dimana kekuasaan ditentukan dalam sebuah mekanisme pemilihan. Peranan tokoh agama sebagai patron dimasyarakat menciptakan keteladanan yang disegani termasuk pada tindakan politiknya. Membangun jaringan dari gerakan kultur menuju gerakan politik semakin menguatkan tokoh agama untuk berkontestasi.

Secara politik, kemampuan tokoh agama dalam mengontrol serta menghimpun massa tidak bisa dikesampingkan ketika kekuasaan itu ditunjang nilai-nilai tradisi yang terbentuk. Karena pada akhirnya kemampuan tokoh agama dalam berpolitik tidak bisa dilepaskan dari nalar agama yang dimiliki. Etika dan moral yang dibangun tentu menjadi pertarungan tokoh agama. Oleh karena itu peluang tokoh agama menjadi pemimpin daerah semakin mudah apabila mendapatkan dukungan masyarakat serta partai politik secara menyeluruh.

Sejatinya upaya yang dilakukan tokoh agama dalam berpolitik, bukan hanya dilihat dari model kekuasaannya saja. Masih ada beberapa hal yang dapat dikembangkan oleh peneliti lain. Seperti spiritualitas tokoh agama ketika mengikuti kontestasi politik meskipun bukan hanya tokoh agama muslim melainkan agama yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Aswar, H. (N.D.). *Pengaruh Ulama Dalam Politik Di Negara Muslim*: Jurnal Ilmu Sosial Indonesia, Vol.2, No.1, Maret 2015 Hal 85-102.

Chalik, A. (2015). *Elite Lokal Berbasis Pesantren Dalam Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah Di Jawa Timur*. Karsa: Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman Vol. 23 No. 2, Desember 2015: 363-381 Doi: 10.19105/Karsa.V2312.744

Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam Di Indonesia*, Jilid 3, 1987/1988, Hal. 989; Lihat

Yoga Adi Pradana

- Juga Azyumardi Azra, "Ulama, Politik Dan Modernisasi", *Ulumul Qur'an*, II, No.7 (1990)
- Gaventa, John, "Finding The Spaces For Changes; A Power Analysis", *Ids (Institute Of Development Studies) Bulletin*, Vol. 37, No. 6 (November 2006)
- Graaf, H.J. De "Southeast Asian Islam In The Eighteenth Century", Dalam P. M. Holt, Ann K. S. Lambton, Dan Bernard Lewes (Eds.) *The Cambridge History Of Islam*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1970)
- Haboddin, M. (2020). Sirkulasi Elite Lokal Di Bantaeng. *Jurnal Transformative*, 6(1), 72–90.
<https://doi.org/10.21776/Ub.Transformative.2020.006.01.4>
- Hannan, A., & Abdillah, K. (2019). *Hegemoni Religio-Kekuasaan Dan Transformasi Sosial*. Sosial Budaya, Volume 16, Nomor 01, Juni 2019, Pp. 9 - 24
- Halim, Abdul, *Politik Lokal; Pola, Aktor Dan Dramatikalnya* (Yogyakarta: Lp2b, 2014)
<https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/17/12/28/P1moo7257-Ustaz-Abdul-Somad-Dicekal-Pbnu-Pemerintah-Harus-Jelaskan>
<https://www.malang-post.com/berita/detail/pkb-kocar-kacir/20-februari-2020>
http://www.powercube.net/wpcontent/uploads/2009/12/Finding_Spaces_For_Change
- <https://nasional.kompas.com/read/2018/05/07/15542341/Hakim-Hti-Terbukti-Ingin-Mendirikan-Negara-Khilafah-Di-Nkri?Page=All>
- <https://www.malangtimes.com/baca/54314/20200625/214400/Pakar-Politik-Ub-Malang-Kunci-Pilkada-Kabupaten-Malang-Ada-Di-Nu>
- Jannah, H. (2015). *Kyai, Perubahan Sosial Dan Dinamika Politik Kekuasaan*. Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah Dan Studi Keagamaan Volume 3, No.1, Juni 2015
- Kartodirdjo, Sartono (Ed.), *Pesta Demokrasi Di Pedesaan* (Yogyakarta: Aditya Media, 1992)
- Mahadi, U. (2015). Komunikasi Politik Kiai Pada Kampanye Pemilu. *Addin*, 9(2), 229.
<https://doi.org/10.21043/Addin.V9i2.614>
- Natsir, M., *Capita Selecta*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973)
- Nurhadi, Sunarso, Peran Kiai Dalam Membangun Partisipasi Pemilih, *Jippk*, Volume 3, Nomor 2, Halaman 169-175 *Issn: 2528-0767 (P) Dan 2527-8495 (E)* <http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk>
- Nuryansah, M. (2014). Transformasi Kyai Menjadi Politisi. *Islamic Review : Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, Vol 3 No 1 (2014): *Islamic Review : Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 233–242.
- Pradana, M. Y. A. (2019). *Relasi Sosial Elit Politik Dan Sesepuh Desa Melalui Langgar Di Kabupaten Malang*. *Jurnal Sosiologi Agama: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama Dan Perubahan*

- Pradana, M. Y. A. (2020). Elite Rationality, Traditions And Pragmatic Politicians. *Journal Of Politics And Policy Volume 2, Number 2, Juni 2020*.
- Rush, M. & Althof, P. 2007. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada.
- Salehudin, A. (2016). Konstruksi Jaringan Sosial Pesantren: Strategi Eksis Di Tengah Perubahan. *Religi Jurnal Studi Agama-Agama, 10(2)*, 204. <https://doi.org/10.14421/Rejusta.2014.1002-05>
- Saputro, A. (2018). Agama Dan Negara: Politik Identitas Menuju Pilpres 2019. *Asketik, 2(2)*. <https://doi.org/10.30762/Ask.V2i2.912>
- Sp. Varma, *Teori Politik Modern*, Terj. Yohannes Kristiarto, Dkk. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)
- Stake, Robert E, 2005. *The Art Of Case Study*, London: Sage Publication, Inc
- Yafie, Ali “Analisa Perjuangan Ulama Di Indonesia”, Panji Masyarakat, No. 69 (April 1989)
Lihat Juga Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren*, (Jakarta: Lp3es, 1982).
- Zawawi, A., Pd, S., & Pd, M. (2015). *Politik Dalam Pandangan Islam. Jurnal Ummul Qura Vol V, No 1, Maret 2015* Hal.85-100

Wawancara

- Wawancara, Annas Muhammad, Anggota Nu Dan Direktur Lembaga Riset Lokal Pada Tanggal 8 Februari 2020
- Wawancara, Aris, Masyarakat Desa Sanankerto, Wajak, Pada Tanggal 10 Januari 2020
- Wawancara, Wawan, Masyarakat Desa Karangploso, Pada Tanggal 10 Februari 2020
- Wawancara, Muklis, Masyarakat Desa Purwodadi, Pada Tanggal 20 Januari 2020
- Wawancara, Kepala Dusun Di Kecamatan Pakis Pada Tanggal 10 Februari 2020
- Wawancara, Yusuf, Masyarakat Turen Pada Tanggal 29 Januari 2020
- Wawancara, Supono, Masyarakat Pakis Pada Tanggal 12 Februari 2020
- Wawancara Muhammad Nuraini, masyarakat wajak Tanggal 23 Maret 2020

ISSN (O)



E-ISSN (P)

